



Dialog Nasional Memastikan Akses Keadilan Perempuan Pekerja Migran Korban Kekerasan Berbasis Gender dengan Kerangka Kerja Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) | ©IUN Women 2024

## TATA KELOLA MIGRASI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Periode: Januari 2022 – September 2024 (33 bulan)

Budget: USD 1.700.000

Kerangka Terkait: Kesepakatan Global mengenai Migrasi (KGM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Pada bulan Desember 2018, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan migrasi yang bermanfaat bagi semua dengan mengadopsi **Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM)**. Sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi para migran, Indonesia berfokus untuk meningkatkan tata kelola migrasi global dan memastikan bahwa hak asasi manusia para migran menjadi dasar dari kebijakan-kebijakannya.

Program bersama ini mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitasnya dalam **pengelolaan migrasi yang berbasis bukti dan responsif gender** pada tingkat nasional dan daerah.

Melalui program ini, PBB mendukung pembentukan mekanisme koordinasi antar kementerian dari **Rencana Aksi Nasional** untuk implementasi komitmen di bawah Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM).



**2,3 juta** warga negara Indonesia berada di luar negeri  
Kementerian Luar Negeri (2023)



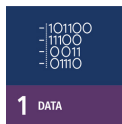
**355.000** migran internasional di Indonesia  
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, PBB (2020)



**55%** dari pekerja migran adalah perempuan  
Badan Pusat Statistik/BPS (2020)



**168 ribu** pekerja asing di Indonesia  
Kementerian Ketenagakerjaan (2023)



TINGKAT NASIONAL & DAERAH



Pelatihan Migrasi Aman dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pekerja Migran | ©UN Women 2024

## PENCAPAIAN UTAMA

(per September 2024)

### Pelatihan Kapasitas dalam Tata Kelola Migrasi di Tingkat Nasional

- Menyelenggarakan dua rangkaian **pelatihan** untuk 47 pejabat pemerintahan mengenai *Essentials of Migration Management* (EMM 2.0), membantu untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran pemerintah terhadap tata kelola migrasi.
- IOM berkolaborasi dengan kementerian-kementerian utama dalam membuat **Tinjauan Data Sekunder Nasional Indonesia (NSDR)** untuk mendukung pembuatan kebijakan migrasi berbasis bukti. NSDR berfungsi sebagai repositori dari sumber-sumber data migrasi yang penting di Indonesia untuk mendukung upaya lebih lanjut Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi inisiatif Satu Data Migrasi Internasional (SDMI).
- Program bersama berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memfasilitasi diskusi dan konsultasi antar kementerian dan mitra pembangunan terkait dalam mendukung proses inisiatif **Satu Data Migrasi Internasional untuk Indonesia** (SDMI). Pertemuan ini menyoroti pentingnya kerja sama dan sinergi antar kementerian untuk mendukung proses pengumpulan data dan memperkenalkan proses pelaporan rutin ke dalam SDMI.
- **Asesmen Indikator Tata Kelola Migrasi** mengumpulkan 98 indikator dari 39 kementerian/lembaga, yang mencakup enam dimensi tata kelola migrasi yang baik. Proses asesmen ini terdiri dari pertemuan pengantar, Diskusi Kelompok Terarah (FGD), dan rapat konsultasi antar pemangku kepentingan dan pertemuan validasi. Asesmen tersebut menemukan bahwa Pemerintah Indonesia secara aktif memimpin isu-isu terkait migrasi pada badan-badan dan kerangka kerja regional dan internasional. Selain itu, Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan rekrutmen etis pekerja migran Indonesia dan melindungi hak-hak mereka sepanjang semua tahapan migrasi, mulai dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang No. 18 tahun 2017).





Dialog dengan Pemerintah Filipina tentang Penguatan Kebijakan Awak Kapal Perikanan Migran | ©IOM 2024

## PENCAPAIAN UTAMA

(per September 2024)

- Meluncurkan profil MGI Nasional dan Lokal di portal IOM Publications serta mengadakan **diskusi publik terhadap Rencana Aksi Nasional Kesepakatan Global mengenai Migrasi (KGM)** yang dihadiri oleh 160 peserta dari pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan migran.
- **Lokakarya Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran & Awak Kapal Perikanan Migran** telah diadakan dan dihadiri oleh 102 peserta dari kementerian dan lembaga terkait, OMS, serikat pekerja, dan akademisi untuk menjamin kesejahteraan awak kapal migran Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan.
- Peluncuran **Studi Kelayakan terhadap Mekanisme Pembiayaan Inovatif untuk Migrasi Tenaga Kerja**, dihadiri oleh 47 peserta.
- Memfasilitasi **satu diskusi lintas kementerian** dan **satu forum multi pihak**, untuk membahas integrasi tata kelola migrasi dan Kesepakatan Global mengenai Migrasi (KGM) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) yang akan datang. Acara ini dihadiri oleh 110 peserta.
- Memfasilitasi **dialog antara Delegasi Indonesia dan Pemerintah Filipina untuk memperkuat kebijakan bagi pekerja awak kapal migran di Indonesia**. Sebanyak 5 kementerian/lembaga dan 1 *think tank* berpartisipasi dalam dialog tersebut dan mengunjungi 3 kantor Pemerintah Filipina, 2 organisasi internasional, dan 1 lembaga amal Katolik. Dialog tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Indonesia terkait pekerja awak kapal migran.
- Memfasilitasi **Simposium Nasional tentang Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan**, yang dihadiri oleh 128 peserta dari kementerian/lembaga, LSM, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga PBB, mitra pembangunan sebagai platform untuk bertukar pengetahuan dan strategi inovatif untuk tata kelola migrasi dan pelaksanaan GCM.



Proyek Percontohan Pembiayaan Bersama di Wonosobo, Jawa Tengah | ©IOM 2024

## PENCAPAIAN UTAMA

(per September 2024)

### Pelibatan Mitra Masyarakat Sipil

- Memfasilitasi **dialog keseluruhan masyarakat** dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan memetakan inisiatif pengelolaan migrasi dan berkontribusi untuk implementasi Rencana Aksi Nasional untuk prioritas-prioritas KGM pemerintah. Diskusi terkait KGM ini terbagi ke dalam 3 tema yaitu **Rencana Aksi Nasional Implementasi KGM, Pencegahan Kekerasan berbasis Gender, dan Pengumpulan Data Berbasis Bukti untuk Merumuskan Kebijakan Migrasi yang Inklusif**, yang dihadiri sejumlah 212 peserta (50% di antaranya adalah perempuan) yang berasal dari berbagai instansi (17 organisasi masyarakat sipil, 5 universitas, 7 kementerian, dan lembaga, termasuk 6 lembaga PBB dan mitra-mitra pembangunan).
- Memfasilitasi diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan **7 organisasi masyarakat sipil** bertujuan untuk mengumpulkan wawasan dan rekomendasi berharga dari aktor non-pemerintah mengenai draf **Tujuan Pembangunan Nasional Jangka Menengah**. Selain itu, UNDP juga menyelenggarakan forum multistakeholder yang dihadiri oleh 5 CSO, agen PBB, 9 kementerian/lembaga, 5 LSM, 4 akademisi, 3 lembaga PBB, dan 2 sektor swasta.

### Mendorong Implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) di Daerah

- Tiga **sosialisasi mengenai Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) dan agenda 2030 di tingkat daerah** telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh 194 peserta dari pelbagai pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat sipil, persatuan migran, akademisi, dan media.



di Indonesia

Jakarta, 23 Juli 2024



Simposium Nasional Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia | ©UNDP 2024

## PENCAPAIAN UTAMA

(per September 2024)

- 109 pejabat pemerintah daerah dan mitra masyarakat sipil dilatih mengenai Inisiatif Bersama Migrasi dan Pembangunan atau *Joint Migration Development Initiatives (JMDI)* untuk **pengelolaan migrasi dan memaksimalkan potensi migrasi** di tingkat daerah.
- Pelibatan pemimpin daerah untuk memperkuat prioritas **tata kelola migrasi di daerah**.
- Diskusi kelompok terarah (FGD) di **6 wilayah target**: Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros, Semarang, dan Grobogan sebagai bagian dari pengembangan **Pedoman Teknis untuk Integrasi Kebijakan Migrasi ke dalam Kebijakan, Perencanaan, dan Anggaran Daerah**. Acara ini dihadiri oleh 338 pemangku kepentingan, di mana 142 di antaranya adalah perempuan, yang berasal dari berbagai kantor pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
- Asesmen **Indikator Tata Kelola Migrasi Lokal** dilakukan di Provinsi Jawa Tengah untuk mengumpulkan **76 indikator dari 58 organisasi perangkat daerah/OPD** (tingkat provinsi dan kabupaten/kota), dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai fasilitator. Proses tersebut melibatkan pertemuan awal, FGD, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pertemuan validasi. Sebagai bagian dari hasil penilaian, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan peraturan nasional untuk memfasilitasi akses layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah bagi pekerja asing. Layanan daerah yang dapat diakses secara daring juga tersedia bagi warga negara Indonesia di wilayah Jawa Tengah yang ingin bermigrasi.
- Melalui **enam inisiatif percontohan pembiayaan inovatif** di tiga target wilayah di Indonesia (Maros, Wonosobo, dan Lombok Barat), program bersama telah meningkatkan kesejahteraan dari purna pekerja migran dan komunitasnya, mencapai sebanyak **606 individu** beserta keluarganya (417 perempuan dan 189 laki-laki).



Peluncuran Resmi Pemberdayaan Pekerja Migran: Studi Kelayakan Mekanisme Pembiayaan Inovatif untuk Migrasi Tenaga Kerja, menandai langkah penting dalam mendukung pekerja migran Indonesia melalui solusi pembiayaan inovatif | ©UNDP 2024

# PENCAPAIAN UTAMA

(per September 2024)

## Penerapan berbasis HAM dan Responsif Gender Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (KGM)

- Dua pelatihan yang dihadiri 74 peserta (70% perempuan), perwakilan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, dilatih tentang **implementasi KGM yang berbasis hak asasi manusia dan responsif gender**.
- 61 peserta, termasuk 18 organisasi masyarakat sipil, 8 lembaga pemerintahan, 3 universitas, 5 mitra pembangunan dan PBB terlibat aktif dalam diskusi mengenai **Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender**.
- 375 penyedia layanan garis depan (151 perempuan) dari Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Bea Cukai di wilayah-wilayah perbatasan dilatih mengenai **layanan berbasis hak dan berpusat pada korban untuk merespon pekerja migran perempuan dan keluarganya yang terkena dampak kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang**.
- 244 perempuan dan 181 laki-laki lainnya yang juga dari pengurus Koperasi Mitra Dhuafa, pasangan lelaki pekerja migran dan fasilitator lokal, dari Lombok Timur, Cilacap, dan Cirebon, telah dibekali dengan **pengetahuan dan keterampilan tentang migrasi yang aman, kesetaraan gender dan pengasuhan anak berbasis komunitas, perencanaan keuangan, dan kewirausahaan digital**.
- Risalah kebijakan tentang **Mengakhiri Hambatan Perempuan Pekerja Migran Korban Kekerasan dalam Mengakses Keadilan dan Pemulihan melalui Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP)** di Provinsi Jawa Tengah dan NTB telah selesai disusun dan telah disebar ke para pemangku kepentingan terkait. Risalah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan akses keadilan bagi pekerja migran perempuan yang terkena dampak kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana terpadu. Pengumpulan data melibatkan 356 pemangku kepentingan (275 perempuan), termasuk 105 pekerja migran (92 perempuan) dalam kelompok terarah dan wawancara. Risalah ini disosialisasikan pada Dialog Nasional yang dihadiri oleh 134 peserta (101 perempuan) secara daring dan luring.





Dialog Pemuda: Mengupas Kesepakatan Global mengenai Migrasi di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat | ©IOM 2024

## PENCAPAIAN UTAMA

(per September 2024)

- **Mekanisme koordinasi dan rujukan telah dikembangkan di NTB dan Jawa Tengah untuk memperkuat dukungan bagi pekerja migran perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dan perdagangan orang.** Jawa Tengah sedang memperbarui Nota Kesepahaman (MOU) dengan penegak hukum dan layanan terpadu dari Dinas Tenaga Kerja dan BP3MI, sementara Nusa Tenggara Barat juga sedang mengembangkan upaya serupa. Konsultasi melibatkan 185 peserta (125 perempuan) dari sektor-sektor kunci.
- 41 peserta (27 perempuan) dari pemerintah daerah, penegak hukum, penyedia layanan, dan masyarakat sipil di Jawa Tengah dan NTB dilatih mengenai **SPPT-PKKTP**. Sebagai bagian dari kegiatan, peserta dari NTB melakukan studi lapangan ke pusat layanan utama di Jawa Tengah, antara lain Pengadilan Negeri Semarang dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kepolisian Daerah untuk mendapatkan wawasan dan pembelajaran tentang pelaksanaan layanan peradilan terpadu.
- Peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam **mencegah dan merespon kasus Kekerasan Berbasis Gender dan perdagangan orang yang dialami perempuan pekerja migran ditingkatkan dengan penguatan fungsi aplikasi "Safe Travel"**. Aplikasi ini sekarang diperkaya dengan informasi terkait pencegahan KBG dan memiliki fitur interaktif **chatbot AI yang responsif gender dan berpusat pada penyintas**. Asesmen dengan pendekatan yang berpusat pada manusia (*human-centered design*) telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas aplikasi, yang melibatkan 59 responden survei (52 perempuan), 12 peserta diskusi kelompok terarah, dan enam orang yang diwawancarai. Chatbot yang telah dikembangkan menyediakan informasi migrasi yang aman dan menciptakan ruang bebas bias gender dan stigma bagi pengguna, termasuk pekerja migran perempuan yang terkena dampak KBG dan TPPO.



Proyek Percontohan Pembiayaan Bersama di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | ©IOM 2024

Program bersama ini telah menghasilkan narasi dan persepsi positif terhadap migran dan pengungsi melalui pelatihan dan diskusi yang memfokuskan pada kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional dengan mempromosikan hak asasi seluruh migran di seluruh tahapan dari siklus migrasi.

Mitra Pelaksana



KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA



KEMENTERIAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA



Kementerian  
Hukum dan HAM



BP2MI  
Badan Pelindungan  
Pekerja Migran  
Indonesia



BADAN PUSAT STATISTIK



PUSAT  
INVESTASI  
PEMERINTAH



DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



LBH-APIK  
NUSA TENGGARA BARAT



LRC - KJHAM  
Legal Resource Center  
untuk Keadilan, Jender  
dan Hak Asasi Manusia



RUMAH  
PEREMPUAN  
MIGRAN



Affiliated with:  
PUNCAK HIRSI  
LEARNING CENTER



Serikat Buruh Migran Indonesia  
SBMI



SEMUT  
NUSANTARA